

**PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN,
AKUNTABILITAS PUBLIK, DESENTRALISASI,
DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
TERHADAP KINERJA MANAJERIAL
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi)**

Oleh:

Eka Jas Oktavia Sari

Pembimbing : Taufeni Taufik dan Mudrika Alamsyah Hasan

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

E-mail: eka_jasoktaviasari@yahoo.co.id

*Effect Of Participation Budgeting, Public Accountability, Decentralization, And
Internal Control Systems Of Managerial Performance Of Local Government
(Empirical Study On Regional Working Unit Regency of Kuantan Singingi)*

ABSTRAK

This study aims to determine the empirical evidence of the effect of budget participation, public accountability, decentralization, and the internal control system of the local government managerial performance. The population in this study is 29 working units Kuantan Singingi District. Samples taken amounted to 87 respondents. The type of data used are primary data to the data collection method using a questionnaire. Data analysis method used in this study is multiple regression with SPSS version 17. Research shows that: 1) budgetary participation influence the managerial performance of local governments with a level of sig(0.015) < (0.05) and t_{count} (2.491) > t_{table} (1.98861) then H1 is accepted, 2) public accountability affect the managerial performance of local governments with a level of sig (0.038) < (0.05) and t_{count} (2.110) > t_{table} (1.98861)) then H2 is accepted, 3) decentralization affect the managerial performance of local governments with a level of sig (0.034) < (0.05) and t_{count} (2.157) > t_{table} (1.98861) then H3 is accepted and 4) internal control system effect on managerial performance of local governments with a level sig (0.023) < (0.05) and t_{count} (2.310) > t_{table} (1.98861) then H4 is accepted. With a total value of R2 square of 0.530 which means that 53% of independent variables in this study could affect the dependent variable, while the rest of 47% is explained by other variables such as motivation, characteristics of the target budget, organizational commitment, and leadership style.

Keywords: *Managerial Performance of Local Government, Participation Budgeting, Public Accountability, Decentralization, and Internal Control System*

PENDAHULUAN

Kinerja manajerial pemerintah daerah merupakan isu yang saat ini menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik yang

dirasakan oleh rakyat dan mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah.

Rakyat menuntut pemerintahan mempunyai kinerja yang baik dalam

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (Perpres RI No. 29 Tahun 2014).

Menurut Mahoney et. al. (1963) dalam Natalia (2010), kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, antara lain perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negoisasi, perwakilan dan kinerja secara keseluruhan.

Di Indonesia, Pada semester 1 tahun 2014 BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas 16 objek pemeriksaan, terdiri atas 9 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 1 objek pemeriksaan pemerintah provinsi, 4 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota, dan 2 objek pemeriksaan BUMN. Hasil pemeriksaan kinerja Semester I Tahun 2014 menemukan 6 kasus ketidakhematan/ketidakekonomisan senilai Rp77,90 miliar, 5 kasus ketidakefisienan, dan 173 kasus ketidakefektifan senilai Rp419,59 miliar. Hasil pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan adanya 45 kasus kelemahan pengendalian intern

yang mempengaruhi kehematan atau ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, serta 10 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp42,28 miliar (www.bpk.go.id).

Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK di Kabupaten Kuantan Singingi, Pada tahun 2013 terdapat beberapa kelemahan yang terkait permasalahan sistem pengendalian intern yaitu pengelolaan dana jamkesmas tidak melalui mekanisme APBD dan digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan dan operasional RSUD, Penerimaan dari hasil penjualan tandan buah segar (TBS) Tahun 2013 pada Dinas Perkebunan digunakan langsung untuk operasional, penatausahaan piutang PBB belum memadai, persiapan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menuju penerapan laporan keuangan berbasis akrual belum memadai (www.bpk.go.id).

Faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi kinerja manajerial pemerintah daerah adalah partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, desentralisasi, dan sistem pengendalian intern.

Partisipasi penyusunan anggaran sangat erat hubungannya dengan kinerja pemerintah daerah, karena kinerja pemerintah daerah dilihat berdasarkan partisipasi aparat pemerintah dalam menyusun anggaran (Mahoney 1963). Hal tersebut sangat penting karena aparat pemerintah daerah akan merasa lebih produktif dan puas terhadap pekerjaannya sehingga memungkinkan timbulnya perasaan berprestasi yang dapat meningkatkan kinerjanya.

Kinerja akan dikatakan efektif ketika pihak bawahan mendapat kesempatan terlibat dalam

penyusunan anggaran. Partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran kemungkinan juga mempengaruhi kinerja manajerial, karena dengan adanya partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran maka bawahan merasa terlibat dan harus bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran, sehingga bawahan diharapkan dapat melaksanakan anggaran dengan lebih baik (Anthony dan Govindarajan, 2005:88).

Faktor kedua yang diduga mempengaruhi kinerja manajerial yaitu akuntabilitas publik. Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat (Mardiasmo, 2002).

Desentralisasi juga menjadi hal yang penting untuk dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas publik terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Pratiwy, 2013). Hill (1998) dalam Oktaviani (2003) menyatakan bahwa desentralisasi mendorong peningkatan kinerja di organisasi yang kompleks. Dengan lingkungan yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, organisasi sektor publik dituntut untuk dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat terkait dengan tugasnya untuk melayani kebutuhan masyarakat. Adanya desentralisasi dalam wujud pelimpahan wewenang ini akan meningkatkan kinerja organisasi sektor publik.

Dengan demikian desentralisasi akan membuat tanggung jawab yang lebih besar kepada manajerial

SKPD dalam melaksanakan tugasnya, memberikan kebebasan dalam bertindak serta meningkatkan independensi manajerial SKPD dalam berfikir dan bertindak dalam satu tim tanpa mengorbankan kebutuhan organisasi.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, melalui PP Nomor 60 Tahun 2008 pemerintah menetapkan adanya suatu sistem pengendalian intern yang harus dilaksanakan, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya pengendalian intern maka seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisiensi untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Soeseno, dalam Ramandei, 2009).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang sudah dilakukan oleh Afrida tahun 2013 dengan judul Pengaruh Desentralisasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota

Padang). Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena adanya penambahan dua variabel independen yaitu partisipasi penyusunan anggaran, dan akuntabilitas publik. Serta penelitian ini objeknya pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi sedangkan penelitian sebelumnya adalah Kota Padang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, desentralisasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah.

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah, 2) menguji pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah, 3) menguji pengaruh desentralisasi terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah, 4) menguji pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah.

LANDASAN TEORI

Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah

Secara umum, Kinerja merupakan suatu prestasi atau tingkat keberhasilan yang dicapai oleh individu atau suatu organisasi dalam melaksanakan pekerjaan pada suatu periode tertentu. Kinerja berdasarkan PP No. 29 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2), kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Menurut Mahoney *et. al.* (1963) dalam Natalia (2010), kinerja

manajerial adalah Kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, antara lain :

1. Perencanaan.
2. Investigasi.
3. Pengkoordinasian.
4. Evaluasi.
5. Pengawasan.
6. Pemilihan Staf.
7. Negoisasi.
8. Perwakilan.

Partisipasi Penyusunan Anggaran

Menurut Brownel dan Mc. Innes (1986), partisipasi penyusunan anggaran adalah keikutsertaan individu berupa perilaku, pekerjaan, dan aktifitas oleh aparat pemerintah selama proses penyusunan anggaran tersebut berlangsung.

Menurut (Bastian, 2005:164), ada tujuh fungsi anggaran yaitu sebagai berikut: anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilakukan dari masa mendatang, anggaran sebagai alat komunikasi intern, anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja, anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi, anggaran merupakan instrumen politik, anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

Prinsip anggaran sektor publik menurut (Bastian, 2005:178), yaitu :

1. Demokratis.
2. Adil.
3. Transparan.
4. Bermoral tinggi.
5. Akuntabilitas.

Akuntabilitas Publik

Menurut (Mardiasmo, 2002 :20), akuntabilitas publik adalah akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk

memberikan pertanggung-jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung-jawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2001), terdapat empat dimensi akuntabilitas publik yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum
2. Akuntabilitas proses
3. Akuntabilitas program
4. Akuntabilitas kebijakan

Desentralisasi

Menurut UU RI No. 23 tahun 2014, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusannya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Gordon dan Narayanan (1984) dalam Bangun (2009), indikator dalam desentralisasi terdiri dari:

- a. wewenang dalam menentukan jumlah
- b. wewenang dalam menentukan program dan kegiatan
- c. wewenang dalam menentukan keterlibatan
- d. wewenang dalam menentukan skala prioritas
- e. wewenang dalam menentukan penambahan dan mutasi pegawai

Sistem Pengendalian Intern

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008, Sistem pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang

dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Unsur sistem pengendalian intern dalam PP No. 60 tahun 2008 adalah :

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah.

Siegel dan Marconi (1989) dalam Arifin (2012) menyatakan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran dapat mengembangkan inisiatif sehingga para partisipan dapat menyumbangkan ide dan informasi, meningkatkan kebersamaan dan merasa memiliki, sehingga kerjasama di antara anggota dalam mencapai tujuan meningkat.

Berdasarkan Penelitian Brownell (1982), Indriantoro (1993) dalam Sumarno (2005), dan Arifah (2007) dalam Septi (2010) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dan kinerja aparatur pemerintah.

H1 : Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah

Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah.

Teori yang dinyatakan Mardiasmo (2002), menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja manajerial, karena dengan adanya akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat tidak hanya untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian Putra (2013), menyimpulkan bahwa akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD.

H2 : Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah.

Pengaruh Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah.

Osborne dan Gabler (1992) dalam Oktaviani (2003), menyatakan bahwa organisasi yang menerapkan struktur desentralisasi jauh lebih fleksibel dari pada sentralisasi karena dapat memberikan respon lebih cepat terhadap lingkungan dan kebutuhan yang berubah. Selain itu organisasi yang terdesentralisasi jauh lebih efektif, inovatif, dan menghasilkan semangat kerja yang tinggi serta lebih produktif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Afrida (2013), menyimpulkan bahwa desentralisasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD

H3 : Desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah.

Pernyataan PP No. 8 Tahun 2006, bahwa tujuan dari pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi organisasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka apabila manajemen telah mampu melakukan hal ini dengan baik maka dengan sendirinya akan memberikan jaminan kepada manajemen untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Apabila tujuan dan sasaran organisasi telah tercapai maka dengan demikian akan meningkatkan kinerja itu sendiri.

Berdasarkan penelitian Afrida (2013), menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial.

H4 : Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD di Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 29 SKPD. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala/pimpinan SKPD, kepala bagian/sub bagian, kepala bidang/ sub bidang pada masing-masing SKPD yang berjumlah 87 responden. Teknik pengumpulan

sampel dalam penelitian ini menggunakan metode total sampling.

Pengujian Data

1. Uji Validitas Data

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2013). Untuk menentukan valid tidaknya suatu item, ditentukan dengan membandingkan antara angka *corrected item total correlation* (rhitung) dengan rtabel pada level signifikan 0.50 nilai kritisnya. Jika nilai rhitung lebih besar dari rtabel, maka item dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Keandalan (*reliability*) suatu pengukuran menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias (bebas kesalahan-*error free*) dan karena itu menjamin pengukuran yang konsisten lintas waktu dan lintas beragam item dalam instrumen (Sekaran, 2007). Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan menggunakan *cronbach's alpha*. Syarat minimum yang dianggap memenuhi syarat adalah kalau koefisien *alpha cronbach's* yang didapat 0,6. Jika koefisien yang didapat kurang dari 0,6 maka instrumen penelitian tersebut dinyatakan tidak reliabel.

3. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013). Pengujian normalitas dalam penelitian ini digunakan dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari data normal.

Uji asumsi klasik

1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model (Ghozali, 2013).

Kriteria terjadinya multikolinieritas adalah jika nilai toleransi di atas 0.10 dan nilai VIF di bawah 10 maka tidak mempunyai persoalan multikolinieritas sehingga bisa dilakukan ke pengujian selanjutnya. Jika nilai *tolerance* di bawah 0.10 dan nilai VIF lebih dari 10, maka terjadi persoalan multikolinieritas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2013) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke residual satu pengamatan yang lain (nilai errornya). Cara mendeteksinya adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatterplot* antara SRESID dan ZPRED, di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-*standardized* (Ghozali, 2013).

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antara pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1(sebelumnya) (Ghozali, 2013). Pengambilan Keputusan ada tidaknya Auto korelasi dilakukan dengan melihat nilai Durbin-Watson,

jika $dU < d < 4 - dU$ maka tidak ada auto korelasi positif dan negatif (tidak ditolak).

Analisis Regresi Berganda

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi berganda yang bertujuan untuk menguji hubungan pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer *Statistical For Social Science (SPSS) versi 17 for windows*. Model persamaannya dapat digambarkan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

- X_1 = Partisipasi Penyusunan Anggaran
- X_2 = Akuntabilitas Publik
- X_3 = Desentralisasi
- X_4 = Sistem Pengendalian Intern

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan dari variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari besarnya koefisien determinasi (R²). Nilai koefisien determinasi adalah 0 sampai 1. Semakin R² mendekati 0 maka semakin kecil kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen. Semakin R² mendekati 1 maka semakin besar pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013).

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis kinerja manajerial, akuntabilitas publik, desentralisasi, dan sistem pengendalian intern dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji t. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Kriterianya adalah apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dan sebaliknya apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten ini berada di bagian barat daya Provinsi Riau dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu.

Analisis Statistik Deskriptif Variabel

Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakter sampel dalam penelitian serta memberikan deskripsi variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah

Berdasarkan diagram bahwa kriteria posisi jawaban responden terhadap variabel kinerja manajerial pemerintah daerah berada pada 70,71%, hal ini menunjukkan bahwa kinerja manajerial pemerintah daerah dilingkungan pemerintah Kab. Kuantan Singingi dikategorikan baik

Partisipasi Penyusunan Anggaran

Berdasarkan diagram bahwa kriteria posisi jawaban responden terhadap variabel partisipasi penyusunan anggaran berada pada 85,29%, hal ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran dilingkungan pemerintah Kab. Kuantan Singingi dikategorikan sangat baik.

Akuntabilitas Publik

Berdasarkan diagram bahwa kriteria posisi jawaban responden terhadap variabel akuntabilitas publik berada pada 86,32%, hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas publik dilingkungan pemerintah Kab. Kuantan Singingi dikategorikan sangat baik.

Desentralisasi

Berdasarkan diagram bahwa kriteria posisi jawaban responden terhadap desentralisasi berada pada 71,46%, hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi dilingkungan pemerintah Kab. Kuantan Singingi dikategorikan baik.

Sistem Pengendalian Intern

Berdasarkan diagram bahwa kriteria posisi jawaban responden terhadap sistem pengendalian intern berada pada 83,85 %, hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern dilingkungan pemerintah Kab. Kuantan Singingi dikategorikan sangat baik.

Hasil Uji Kualitas Data

Hasil Uji Validitas

Hasil pengujian validitas data untuk semua butir pertanyaan pada variable kinerja manajerial pemerintah daerah, partisipasi

penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, desentralisasi dan sistem pengendalian intern memiliki $r_{hitung} > r_{tabel}$, dimana r_{tabel} sebesar 0,2108. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing - masing item pertanyaan dalam variabel penelitian ini dinyatakan valid.

Hasil Uji Reabilitas

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas data untuk setiap variabel, diperoleh hasil *Cronbach alpha* lebih besar dari alpha 0,6 yang berarti bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel atau dapat dipercaya.

Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar hasil uji normalitas data menggunakan SPSS 17 terlihat penyebaran titik-titik disekitar garis diagonal. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Multikolonieritas

Berdasarkan tabel hasil uji multikolinearitas, diperoleh bahwa untuk setiap variabel independennya memiliki nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 . Dengan demikian dapat diketahui bahwa tidak ada multikolonieritas.

2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar hasil uji heteroskedastisitas, terlihat bahwa data tersebar dan tidak tampak adanya suatu pola tertentu pada sebaran data tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas.

3. Hasil Uji Autokorelasi

Berdasarkan tabel hasil uji autokorelasi, diperoleh angka DW sebesar 1.963, dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi dari penelitian ini bebas dari autokorelasi.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh persamaan regresi berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = 16,431 + 0,503X_1 + 0,254X_2 + 0,327X_3 + 0,227X_4$$

HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Berdasarkan hasil perhitungan, maka hasil pengujian untuk H_1 diperoleh nilai t_{hitung} (2.491) $> t_{tabel}$ (1.98861) dengan signifikansi (0.015) $<$ (0.05). Jadi dapat disimpulkan bahwa H_{a1} **diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja manajerial SKPD Kabupaten Kuantan Singingi.

Siegel dan Marconi (1989) dalam Arifin (2012) menyatakan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran dapat mengembangkan inisiatif sehingga para partisipan dapat menyumbangkan ide dan informasi, meningkatkan kebersamaan dan merasa memiliki, sehingga kerjasama di antara anggota dalam mencapai tujuan meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Indriantoro (1993) dalam Sumarno (2005), dan Arifah (2007) dalam Septi (2010) yang menunjukkan bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran

berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian Kenis (1979) yang menemukan bahwa partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial.

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Berdasarkan hasil perhitungan, maka hasil pengujian untuk H_2 diperoleh nilai t_{hitung} (2.110) $> t_{tabel}$ (1.98861) dengan signifikansi (0.038) $<$ (0.05). Jadi dapat disimpulkan bahwa H_{a2} **diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja manajerial.

Tidak dipenuhinya prinsip pertanggungjawaban dapat menimbulkan implikasi yang luas. Jika masyarakat menilai pemerintah daerah tidak *accountable*, masyarakat dapat menuntut pergantian pemerintahan, penggantian pejabat, dan sebagainya. Rendahnya tingkat akuntabilitas juga meningkatkan risiko berinvestasi dan mengurangi kemampuan untuk berkompetisi serta melakukan efisiensi.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Putra (2013) yang menemukan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian Ainul Yusna Harahap (2014) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial.

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Berdasarkan hasil perhitungan, maka hasil pengujian untuk H_3

diperoleh nilai $t_{hitung} (2.157) > t_{tabel} (1.98861)$ dengan signifikansi $(0.034) < (0.05)$. Jadi dapat disimpulkan bahwa H_{a3} **diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja manajerial.

Desentralisasi mendorong peningkatan kinerja di organisasi yang kompleks. Dengan lingkungan yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, organisasi sektor publik dituntut untuk dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat terkait dengan tugasnya untuk melayani kebutuhan masyarakat (Hill 1998 dalam Oktaviani 2003).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tuati (2007), Pratiwy (2013) dan Bangun (2009) yang menemukan bahwa desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian Mia dan Mia (1996), dimana desentralisasi tidak berhubungan langsung dengan kinerja. Serta penelitian Dian Indudewi (2009) yang menemukan bahwa desentralisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi.

Hasil Pengujian Hipotesis Keempat

Berdasarkan hasil perhitungan, maka hasil pengujian untuk H_4 diperoleh nilai $t_{hitung} (2.310) > t_{tabel} (1.98861)$ dengan signifikansi $(0.023) < (0.05)$. Jadi dapat disimpulkan bahwa H_{a4} **diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja manajerial.

Dengan adanya pengendalian intern maka seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisiensi untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Soeseno, dalam Ramandei, 2009). Oleh karena itu diharapkan dengan sistem pengendalian intern yang efektif akan berpengaruh terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramandei (2009), Tuati (2007) dan Afrida (2013) yang menemukan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian Bobby Kurniawan (2006) yang menemukan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) sebesar 0,530. Artinya adalah bahwa pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, desentralisasi dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah adalah sebesar 53%. Sedangkan sisanya 47% dijelaskan oleh variabel lain seperti motivasi kerja, karakteristik sasaran anggaran, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan dan yang lainnya.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

1. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi.

Keterbatasan

1. Jawaban responden belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan akan berbeda jika data diperoleh dengan wawancara.
2. Masih banyak variabel lain yang mempengaruhi kinerja manajerial tersebut seperti motivasi kerja, karakteristik sasaran anggaran, dan lain-lain.
3. Kemungkinan responden tidak menjawab secara serius atau tidak jujur dan peneliti tidak mengetahui apakah yang mengisi kuesioner benar-benar responden yang bersangkutan.

Saran

1. Bagi penulis, untuk masa yang akan datang dalam mengisi kuesioner sebaiknya responden di dampingi langsung oleh peneliti.

2. Bagi akademis, penelitian ini dapat dijadikan sumber pembelajaran dan referensi.
3. Untuk penelitian selanjutnya, perlu menambahkan variabel independen lainnya untuk melihat pengaruhnya terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah.
4. Sebaiknya pemerintah daerah meningkatkan partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, desentralisasi, dan sistem pengendalian intern agar kinerja manajerial pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Nur. (2013). *Pengaruh Desentralisasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang)*. Jurnal. Universitas Negeri Padang.
- Anthony, Robert N dan Vijay Govindarajan. 2005. *Sistem pengendalian Manajemen Buku 2*. Terjemahan Kurniawan Tjakrawala. Jakarta: Salemba Empat
- Arifin Solikhun. (2012). *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah, Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Dan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Semarang)*.

- Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Bastian, Indra.(2005). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Brownell.P. (1982).*Participation in Budgeting Process: When it Works and When it Doesn't*, Journal of Accounting Literature, Vol.1, pp. 124-153.
- Brownell, P. and McInnes. (1986). *Budgetary Participation, Motivation, and Managerial Performance*. The Accounting Review, Vol. LXI, 4: 511-526.
- Bangun, A. (2009). *Pengaruh Partisipasi Penyusunan dalam Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Moderating*.Skripsi .Medan.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariates dengan Program IBM SPSS 21.Update PLS RegresiI, edisi 7*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Indudewi, Dian. (2009). *Pengaruh Sasaran Jelas Dan Terukur, Insentif, Desentralisasi Dan Pengukuran Kinerja Terhadap Kinerja Organisasi (Studi Empiris Pada SKPD Dan BUMD Kota Semarang*.Tesis. Universitas Diponegoro.
- Karyanti, Tutik dwi. (2010). *Pengaruh kejelasan Sasaran, Desentralisasi, dan sistem Pengukuran terhadap Kinerja organisasi sektor Publik (Studi Empiris di politeknik Negeri semarang)*. Tesis. Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo.(2002).*Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Kenis I. (1979). *Effect Of Budgetary Goal Characteristics On Managerial Attitudes And Performance*. The Accounting Review, Vol. LIV, No. 4: 707-720
- Mahoney, T.A., T.H. Jerdee and S.J. Carroll,(1963), Development of managerial Performance: A Research Approach, Cincinnati: South Western Publ.Co.
- Mardiasmo. (2001). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo.(2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Miah, N.Z and Mia L. (1996). *Decentralization, Accounting Control System and performance of Government organization: A New Zaeland Empirical study, Financial Acoountablity and management*, 12(3) August: 173-190.

- Natalia, Dewinda Putri. (2010). *Pengaruh Komitmen Organisasional dan peran manajer pengelolaan Keuangan daerah Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja perangkat daerah*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Oktaviani, Ayu. (2003). *Pengaruh Desentralisasi pengambilan keputusan terhadap kinerja manajerial Dinas*. Tesis. Universitas Diponegoro.
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006. *Tentang pelaporan Keuangan dan Instansi pemerintah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 *tentang Sistem Pengendalian Pemerintah*. Melalui (www.google.com).
- Peraturan Perundang - undangan Nomor 23 tahun 2014 *tentang Pemerintah daerah*. Melalui (www.google.com).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 *tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah*.
- Pratiwy, A. (2013). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Desentralisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Padang.
- Putra, D. (2013). *Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang*. Jurnal. Universitas Negeri Padang
- Ramandei, P. (2009). *“Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jayapura)*. ”Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sekaran, Uma. (2007). *Research Methods for Business, Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat. Buku 1. Edisi 4.
- Sumarno, J. (2005). *Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran Dan Kinerja Manajerial*, Simposium Nasional Akuntansi VIII. Solo
- Tuati, Nonce F. (2007). *Pengaruh Desentralisasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Kupang)*. Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 13. No. 3: 363-369. Kupang. Politeknik Kupang.

www.bpk.go.id